BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah keadaan yang lebih baik. Oleh karena itu, pembangunan perlu terus diupayakan baik fisik maupun non fisik dalam segala aspek kehidupan, dimana wujud dari pembangunan nasional dapat meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa Bangsa Indonesia memiliki tujuan nasional yang luhur yaitu: "Terbentuknya suatu pemerintahan yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Tujuan nasional tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan penyelenggaraan negara yang berkedaulatan rakyat dan demokratis, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa. Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia seutuhnya, dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Pelaksanaannya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju dan kukuh berlandaskan kekuatan moral dan etika.

Amanat konstitusi tersebut untuk memenuhi tuntutan perkebangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Disamping itu, wilayah negara Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang besar dan menyebar di seluruh Nusantara serta memiliki kompleksitas nasional dan memiliki kedibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dinyatakan ”Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memaknai kata-kata ”dipilih secara demokratis” tersebut sebagai dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh DPRD seperti pada masa sebelumnya Pemilihan pejabat lokal secara langsung oleh rakyat ini merupakan hal yang baru dan mendasar. Pasal 24 ayat (5) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan: ”Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan”.

Kedekatan birokrasi daerah dengan rakyat, dengan demikian rakyat akan dapat langsung menyuarakan dukungan atau mengkritisi tugas-tugas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan. Sejalan dengan tujuan

reformasi yang ingin mewujudkan Negara Indonesia yang lebih demokratis dengan konsekwensi mau dan mampu mengubah struktur maupun kultur kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat.

Demokrasi bukan semata-mata kebebasan, melainkan kebebasan yang bertanggungjawab serta kreatif dan produktif bagi upaya pencapaian kesejahteraan, keadilan, dan keluhuran martabat rakyat itu sendiri, dalam kaitan ini diperlukan adanya kemampuan masyarakat untuk memilih pimpinannya.

Penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemberdayaan rakyat, dengan harapan terwujud penguatan kedaulatan rakyat sehingga menghasilkan pemerintahan daerah yang dekat dengan rakyatnya, serta mengetahui kebutuhan masyarakatnya. Pemilihan langsung diharapkan akan lahir pimpinan daerah yang sejalan dengan aspirasi mayoritas masyarakat dan memiliki legitimasi politik yang kuat, perluasan hak politik rakyat dengan memberikan hak untuk memilih langsung pemimpin daerahnya bukan ujung dari proses demokratisasi.

Pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum. KPU dalam

menjalankan tugasnya bertanggungjawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi disingkat KPU Provinsi khususnya Provinsi Jawa Barat adalah badan penyelenggara Pemilihan Umum yang independen dan non partisan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2007, dan fungsi sebagai badan penyelenggara Pemilu. KPU Provinsi Jawa Barat adalah Pelaksana Pemilu di Jawa Barat, dan merupakan bagian dari KPU provinsi-provinsi lainnya, mempunyai tugas dan wewenang merencanakan dan melaksanakan pemilu di Provinsi, termasuk menetapkan hasil Pemilu di Provinsi.

KPU Provinsi Jawa Barat berkewajiban mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan pelaksanaan Pemilu kepada Komisi pemilihan umum Pusat dengan penyampaian laporan secara periodik. Laporan secara periodik yang sifatnya segera dan ruang lingkupnya parsial dilakukan dari waktu kewaktu sejalan dengan kebutuhannya.

Sub Bagian Humas KPU Jawa Barat sebagai penyelenggara pemilihan antara lain berkewajiban memberikan nilai informasi seluas-luasnya kepada masyarakat agar mereka bisa menggunakan hak pilihnya secara proporsional. Masyarakat berhak mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur, sehingga mereka memiliki referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* sebagai media informai Sosialisasi Pilgub Jabar melalui *website* di kelola oleh Humas.

Permasalahan Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* *pertama website* *www.kpu.jabarprov.go.id* belum berjalan secara efektif dan efisien dalam kualitas penyajian masih terdapat fitur-fitur yang belum termanfaatkan dan isi sosialisasi dalam *website* tidak secara keseluruhan tertera dalam *website*. *Kedua*, Lemahnya motivasi Kepala Sub Bagian Humas dan aparatur KPU Provinsi Jawa Barat, *Ketiga* limitasi waktu sosialisasi yang sangat pendek oleh Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat. *keempat* kurangnya kedaraan dan pengetahuan kritis masyarakat tentang sistem dan tata cara teknis, *kelima* masyarakat belum mengetahui tentang jadwal dan tahapan berbagai aspek teknis pemungutan dan penghitungan calon terpilih. *keenam*, masih kurangnya partisipasi masyarakat secara aktif dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas**,** maka peneliti mengambil judul **"Asas Motivasi Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Mensosialisasikan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 Melalui *Website* *www.kpu.jabarprov.go.id***".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah arah dan proses pembahasan, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengikutsertakan Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*?
2. Bagaimaa komunikasi Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*?
3. Bagaimana pengakuan Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*?
4. Bagaimana wewenang yang didelegasikan Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melaui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*?
5. Bagaimana keadilan dan kelayakan Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*?
6. Bagaimana perhatian timbal balik Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan Asas Motivasi Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam Mensosialisasikan Hasil

Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* www.kpu.jabarprov.go.id.

Secara khusus tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mengikutsertakan Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* www.kpu.jabarprov.go.id.
2. Untuk mengetahui komunikasi Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* www.kpu.jabarprov.go.id.
3. Untuk mengetahui pengakuan Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* www.kpu.jabarprov.go.id.
4. untuk mengetahui wewenang yang didelegasikan Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* www.kpu.jabarprov.go.id.
5. Untuk mengetahui keadilan dan kelayakan Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* www.kpu.jabarprov.go.id.

6. Untuk mengetahui perhatian timbal balik Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* www.kpu.jabarprov.go.id.

1.4 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memiliki kegunaan yang bersifat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan penelitian bagi diri sendiri adalah dengan diadakanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pelaksanaan proes penelitian mulai dari pencarian masalah sampai dengan selesai dan juga sebagai ajang penerapan ilmu-ilmu ataupun teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan.
2. Pada bidang keilmuan yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian yang dilaksanakan dapat berguna untuk Ilmu Pemerintahan sesuai bidang ilmu yang dipelajari. Di mana dengan penelitian ini, diharapkan akan memberikan sumbangan ilmu serta dapat dijadikan bahan tinjauan awal untuk melakukan penelitian serupa di masa yang akan datang, yaitu dengan mengetahui gejala-gejala baik hambatan, tantangan, dan gangguan dalam proses pelaksanaan penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan dengan cara pencarian data langsung ke sumber data yang bersangkutan, dapat memberikan kegunaan bagi instansi yaitu KPU Provinsi Jawa Barat khususnya asas motivasi Kepala Sub Bagian Humas dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan

Gubernur Jawa Barat. Serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan dibidang keilmuan.

1.5 Kerangka Pemikiran

Asas motivasi merupakan sesuatu yang mendasar bagi setiap organisasi, untuk keberhasilan organisasi, dalam pelaksananya dapat menggunakan asas-asas motivasi yang di kemukakan oleh Hasibuan, asas-asas motivasi yang perlu dimiliki oleh seseorang pemimpin dalam memberikan motivasinya kepada aparatur dalam suatu organisasi sebagai berikut:

1. Asas Mengikutsertakan
2. Asas Komunikasi
3. Asas Pengakuan
4. Asas Wewenang yang didelegasikan
5. Asas Adil dan Layak
6. Asas Perhatian Timbal Balik

(Hasibuan, 2007 : 221)

Pertama, asas mengikutsertakan artinya mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan. Bawahan dapat diberikan motivasi untuk dapat memberikan gagasan pemikiran dan pengambilan keputusan, sehingga mereka sebagai apartur akan merasa bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang di tetapkan bersama.

Kedua, asas komunikasi artinya menginformasikan secara jelas tentang tujuan yang ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya, dan kendala-kendala yang dihadapi. Asas komunikasi merupakan proses penyampaian pesan dari sumber kepada penerima, komunikasi akan berhasil dengan baik apabila pesan yang

disampaikan dapat dimengerti oleh penerima pesan. Penerima pesan ini adalah masyarakat Jawa Barat,

Ketiga, asas pengakuan artinya memberikan penghargaan, pujian dan pengakuan yang tepat serta wajar kepada bawahan atas prestasi kerja yang dicapainya. Asas pengakuan merupakan suatu tindakan oleh seoarang pemimpin mengakui adanya prestasi kerja yang telah dilaksanakan oleh para pegawainya.

Keempat, asas wewenang yang didelegasikan artinya memberikan kewenangan dan kepercayaan diri pada bawahan, bahwa dengan kemampuan dan kreativitasnya ia mampu mengerjakan tugas-tugas itu dengan baik. Asas wewenang merupakan pemimpin yang memberikan otoritas atau wewenang kepada pegawai bawahan untuk sewaktu-waktu dapat mengambil keputusan didalam organisasi terhadap pekerjaan yang dilakukannya, akan membuat pegawai yang bersangkutan menjadi termotivasi untuk pencapaian tujuan yang diharapkan oleh pemimpin.

Kelima, asas adil dan layak artinya alat dan jenis motivasi yang diberikan harus berdasarkan atas "asas keadilan dan kelayakan" terhadap semua karyawan harus adil dan layak kalau masalahnya sama. Asas adil dan layak merupakan seorang pemimpin mengakui bahwa bawahan (pegawai) didalam usaha pencapaian tujuan, dengan pengakuan tersebut pegawai akan lebih mudah dimotivasi kerjanya.

Keenam, asas perhatian timbal balik artinya bawahan yang berhasil mencapai tujuan dengan baik maka pimpinan harus bersedia memberikan alat dan jenis motivasi. Tegasnya kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah

pihak. Asas perhatian timbal balik merupakan pemimpin memberikan perhatian terhadap apa yang diinginkan pegawai, pegawai (bawahan) akan memotivasi bekerja apa yang diharapkan oleh pemimpin.

Berdasarkan hasil uraian diatas penerapan asas motivasi merupakan pertimbangan-pertimbangan yang mutlak dilaksanakan bagi tercapainya tujuan organisasi. terdapat enam indikator asas motivasi yang mendukung kemungkinan keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat. Yaitu asas mengikutsertakan, asas komunikasi, asas pengakuan, asas wewenang yang didelegasikan, asas adil dan layak, asas perhatian timbal balik.

Asas Motivasi dianggap perlu, karena merupakan bagian dari proses pembinaan, pengarahan, dan pengembangan potensi bawahan kearah pemanfaatan yang paling optimal dengan memperhatikan batas-batas kemampuan manusia dengan bantuan sarana dan fasilitas lainnya. Menurut pendapat Hasibuan mengatakan bahwa:

> Asas (prinsip) merupakan suatu peryataan fundamental atau kebenaran umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan. Asas-asas muncul dari penelitian dan pengalaman. Asas ini sifatnya permamen, umum dan setiap ilmu pengetahuan memiliki asas yang mencerminkan "intisari" kebenaran-kebenaran dalam lmu tersebut. Asas adalah dasar tetapi bukanlah sesuatu yang absolut atau mutlak. Artinya, penerapan asas harus mempertimbangkan keadaan-keadaan khusus dan keadaan yang berubah-ubah.

Menurut uraian ditas Asas atau prinsip merupakan sikap seseorang yang mempunyai suatu prinsip yang fundamental, prinsip tersebut terlahir karena adanya penelitian dan pengalaman, asas memiliki sifat yang permanen dan umum,

dalam penerapan asas dalam suatu organisasi selalu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang selalu berubah-ubah dalam organisasi.

Motivasi merupakan suatu usaha positif dalam menggerakan dan mengarahkan sumber daya manusia agar secara produktif berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Motivasi akan tampak sebagai kebutuhan dan sekaligus sebagai perangsang untuk mengarahkan sumber daya manusia kearah tujuan yang diinginkan. Menurut pendapat Veithzal Rivai, mengatakan bahwa pengertian motivasi adalah

> Serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. (Veithzal Rivai, 2005:455).

Berdasarkan uraian di atas motivasi merupakan serangkean sikap seseorang yang memiliki nilai-nilai luhur yang dapat mempengaruhi setiap individu untuk keberhasilan organisasi.

Motivasi yang dimaksud adalah suatu usaha yang diberikan pemimpin dalam menggerakan dan mempengaruhi bawahannya untuk menciptakan kegairahan kerja untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Merihot berpendapat bahwa motivasi adalah:

> Faktor-faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku atau keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk usaha yang keras. (Merihot, 2003:321).

Berdasarkan pengertian diatas motivasi adalah kegiatan seorang pemimpin yang dapat mengarahkan dan mendorong aparaturnya untuk keberhasilan dalam suatu organisasi dengan bentuk usaha yang keras.

Sedangkan menurut pendapat Hasibuan, menjelaskan motivasi melalui aspek motivasi yaitu:

> Aspek motivasi dibedakan antara aspek aktif atau dinamis dan aspek pasif atau statis. Dalam aspek aktif atau dinamis, motivasi tampak sebagai suatu usaha positif dalam menggerakan dan mengarahkan sumber daya manusia agar secara produktif berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam aspek pasif atau statis, motivasi akan tanpak sebagai kebutuhan dan juga sekaligus sebagai perangsang untuk dapat mengarahkan dan menggerakan potensi sumber daya manusia yang diinginkan. (Hasibuan 2007:220).

Berdasarkan pengertian diatas penggunaan kedua jenis motivasi tersebut harus tepat dan seimbang supaya dapat meningkatkan semangat kerja aparatur. Yang jadi masalah ialah kapan motivasi posotif dan motivasi negatif dapat efektif merangsang gairah kerja aparatur. Motivasi positif efektif untuk jangka panjang sedangkan motivasi negatif efektif untuk jangka pendek. Akan tetapi, pemimpin suatu organisasi harus konsisten dan adil dalam menerapkannya.

Menurut pendapat Veithzal Rivai (2005:456), mengatakan bahwa aspek-aspek yang memperngaruhi motivasi adalah sebagai berikut :

1. Rasa aman dalam bekerja.
2. Mendapatkan gaji yang adil dan kompetitif.
3. Lingkungan kerja yang menyenangkan.
4. Penghargaan atas prestasi kerja dan perlakuan yang adil dari manajemen.

(Veithzal Rivai 2005:456)

Menurut uraian diatas dengan melibatkan aparatur dalam pengambilan keputusan, pekerjaan yang menarik dan menantang, kelompok dan rekan-rekan kerja yang menyenangkan, kejelasan akan standar keberhasilan, output yang diharapkan, serta bangga terhadap pekerjaan dan perusahaan dapat menjadi faktor pemicu kerja karyawan

Menurut David MeCelland, dalam bukunya Hasibuan yang berjudul *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, mengemukakan pola motivasi sebagai berikut:

1. *Achievement motivation*, adalah suatu keinginan untuk mengatasi atau mengalahkan suatu tantangan, untuk kemajuan dan pertumbuhan.
2. *Affiliation motivation*, adalah dorongan untuk melakukan hubungan-hubungan dengan orang lain.
3. *Competence motivation*, adalah dorongan untuk berprestasi baik dengan melakukan pekerjaan yang bermutu tinggi.
4. *Power motivation*, adalah dorongan untuk dapat mengendalikan suatu keadaan dan adanya kecenderungan mengambil resiko dalam menghancurkan rintangan-rintangan yang terjadi.

(David MeCelland dalam Hasibuan, 2007:220)

Berdasarkan pendapat di atas, motivasi yang dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Humas dapat mengacu pada dorongan dan usaha untuk keberhasilan mensosialisasikan penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat, dengan salah satu cara melakukan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, masyarakat umum dan partai politik.

Keberhasilan pelaksanaan program sosialisasi oleh KPU tidak lepas dari peran serta masyarakat karena pada hakekatnya program sosialisasi dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan kritis masyarakat tentang sistem dan tata cara teknis mengenai pentingnya Pemilihan Gubernur, Peran serta dari masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai objek dalam pelaksanaan program sosialisasi melainkan sebagai subjek dari pelaksanaan program sosialisasi itu sendiri.

Pemerintah dengan masyarakat memiliki hubungan yang saling ketergantungan. Melalui peran pemerintah, masyarakat di atur dan di penuhi kebutuhannya. Di lain pihak masyarakat membutuhkan peran pemerintah sebagai

pihak yang mengatur kehidupannya, sehingga terciptalah ketertiban dan ketentraman. Sejalan dengan persiapan teknis pemilihan, upaya sosialisasi pun telah dirancang sedemikian rupa oleh KPU. Langkah ini antara lain untuk memberi pemahaman agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya secara optimal.

Menurut Michael Rush dan Philips Althoff mengemukakan tiga segi penting sosialisasi politik, yaitu:

1. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman.
2. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif (atau nilai-nilai) dan sikap.
3. Sosialisasi tidak dibatasi sampai pada kanak-kanak dan masa remaja, akan tetapi sosialisasi tetap berlanjut sepanjang kehidupan.

(Rush dan Althoff, 2002:30).

Menurut pendapat di atas bahwa inti dari sosialisasi adalah proses pembelajaran kepada masyarakat mengenai sesuatu hal yang belum diketahui untuk dapat diterima dan dapat dilaksanakan dengan baik. Proses tersebut dapat bertahan dalam waktu tertentu karena ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi dan kebudayaan.

Menurut Ramlan Surbakti mengemukakan bahwa dari segi penyampaian informasi pesannya sosialisasi politik, dibagi dua, sebagai berikut:

1. Pendidikan politik, merupakan suatu proses diaologik diantara pemberi dan penerima pesan, melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik, seperti sekolah pemerintah dan partai politik.
2. Indoktrinasi politik, proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan manipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa, sebagai ideal dan baik. Melalui

berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin.

(Surbakti, 1992: 117-118)

Menurut pendapat di atas, bahwa dari segi penyampaian informasi pesannya sosialisasi politik merupakan proses dimana seseorang memperoleh sikap penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin mengenai nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol yang berlaku di negaranya.

Berbicara mengenai sosialisasi politik sebagai suatu proses, maka sosialisasi memiliki variabel-variabel sebagai pengukur yang memperlancar atau membantu memperbesar kemungkinan tercapainya sosialisasi politik. Hal ini sejalan dengan variabel yang dikemukakan oleh Michael Rush dan Philip Althoff ada beberapa unsur yang mempengaruhi sosialisasi politik, sebagai berikut:

1. Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu, keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
2. Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat
3. Mekanisme sosialisasi politik diabagi menjadi tiga yaitu, imitasi, intruksi, motivasi.
4. Subyek-subyek atau sasaran sosialisasi politik, meliputi anak, remaja, dan dewasa.
5. Pola sosialisasi politik, di ilustrasikan dalam sebuah gambar.

(Rush dan Althoff, 2002: 37)

Menurut pendapat di atas, bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses pengenalan nilai-nilai dan norma-norma yang berjalan secara berangsur-angsur untuk diketahui oleh umum, yang dapat dipengaruhi oleh agen sosialisasi, materi sosialisasi, mekanisme sosialisasi, pola sosialisasi, serta subyek atau sasaran sosialisasi.

Peranan KPU merupakan salah satu usaha pemerintah dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sosialisasi, khususnya mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat. Undang-Undang tentang penyelenggara pemilihan umum pasal (1) ayat (7) menyebutkan bahwa KPU adalah:

> Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota. (Undang-undang RI Nomor 22 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum pasal (1) ayat (7) tahun 2007).
> (UU RI No 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007).

KPU adalah sebagai produk pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang pemilu. Undang-undang RI tentang penyelelenggara pemilihan umum pasal (1) ayat (1) menyebutkan bahwa, pemilihan umum, selanjutnya Pemilu adalah:

> Undang-undang tentang Penyelenggara Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (Undang-undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum No.22 Tahun 2007:Pasal (1) ayat (1)). (UU RI No. 22 Tentang Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2007)

Pasal diatas mengemukakan mengenai KPU sebagai produk pemerintah yang melayani masyarakat dalam bidang pemilu dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

> Menurut Koirudin, Pemilihan umum dapat diartikan sebagai berikut:
> "Pemilihan umum (pemilu) adalah suatu proses dimana para pemilih, memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.

> Jabatan-jabatanyang disini beraneka ragam, mulai dari perisiden, wakil rakyat diberbagai tingkat pemerinthan, sampai kepala desa. Pada konteks ini yang lebih luas, pemilu juga berarti proses mengisi jabatan-jbatan seperti ketua Osis atau ketua kelas, walaupun untuk itu kata 'pemilihan' lebih sering digunakan" (Koirudin, 2004:94).

Berdasarkan pendapat di atas, pemilu merupakan suatu proses dalam menjaring pemimpin baru untuk untuk mendapatkan anggota lagislatif maupun eksekutif. Penyelenggara pemilu para pemilih juga disebut konstituen, kampanye dilakukan selama waktu yang telah ditentukan, menjelang hari pemungutan suara dan pemilu merupakan wadah aspirasi rakyat dimana rakyat dapat mengemukakan keinginan dalam memilih, melalui Sosialisasi politik yang dilakukan dengan menyelenggarakan Pemilihan Umum atau bisa yang disebut Pemilu .

Penggunaan teknologi dan informasi pada lembaga pemerintah akan berdampak pada peningkatan kinerja aparatur pemerintah dan menghasilkan kualitas kerja yang produktif dan tepat guna. Akan tetapi jika tidak diimbangi dengan kinerja yang efektif maka aplikasi *e-Government* tidak akan berjalan dengan sempurna. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anwar Prabu Mangkunagara. Menurut Anwar Prabu Mangkunagara : "kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai negeri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya" (Mangkunegara, 2006:67).

Hasil kerja yang dicapai oleh seorang aparatur, yang menjalankan tugas yang penuh tanggung jawab, dapat mempermudah arah penataan organisasi pemerintahan. Akibatnya akan tercapai peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Organisasi pemerintahan menggunakan alat untuk mengukur kinerja

birokrasi publik. *Website* merupakan alat komunikasi yang memberikan informasi kepada masyarakat melalui penggunaan teknologi internet. Dengan adanya *website* diharapkan aparatur dan masyarakat di daerah bisa berkomunikasi dengan pemerintah. Dalam penerapanya sebuah *website* harus memiliki elemen-elemen yang wajib dimiliki oleh sebuah *website e-Government* adalah sebagai berikut :

1. Sistem pengorganisasian *content* atau isi *website* haruslah memiliki arsitektur yang jelas dan tersektruktur secara logis
2. Navigasi yang diterapkan dalam *website* haruslah mudah cara pengoperasiannya, Isinya harus *up-to-date* dalam arti kata selalu diperbaharui sehinga relevan dengan kebutuhan,
3. Waktu untuk menampilkan satu halaman penuh *website* haruslah cepat (disarankan tidak lebih dari 10 detik), sehingga perlu dipertimbangakan ukuran memori total dari sebuah desain *website*,
4. Tampilan *website* haruslah menarik dalam arti kata memiliki desain grafis yang disesuaikan dengan *audiencenya*,
5. *Website* haruslah dapat dinikmati oleh semua orang, terlepas dari faktor perbedaan usia, agama, bahasa, maupun hal-hal lain yang terdapat didalam masyarakat,
6. Unsur privasi harus pula diperhatikan dalam arti kata para penggunaan *website* merasa yakin bahwa tidak ada hal-hal yang akan merugikan dirinya terkait dengan isu keamanan berinteraksi secara digital ketika mengakses *website* pemerintah.

(Indrajit, 2005:56).

Penerapan *website* merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Melalui pembangunan *website* www.kpu.jabarprov.go.id mempunyai tujuan untuk memberikan informasi dan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat kepada masyarakat pada umumnya, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami mengenai tahapan pemilu serta berbagai aspek pemilu terutama mengingatkan hari minggu tanggal 13 April 2008 merupakan proses pemungutan dan penghitungan secara serempak dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Jawa Barat, mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara rasional, menciptakan situasi yang

kondusif sehingga pemilu dapat berjalan secara damai tanpa konflik dan kekerasan.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka dapat diambil definisi operasional dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Asas merupakan sesuatu yang mendasar yang sifatnya permanen, umum untuk dilaksanakan oleh Kepala Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*.
2. Motivasi merupakan suatu usaha positif dalam menggerakan dan mengarahkan sumber daya manusia agar secara produktif berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Motivasi akan tampak sebagai kebutuhan dan sekaligus sebagai perangsang untuk mengarahkan sumber daya manusia kearah tujuan yang diinginkan, khususnya oleh Kepala Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*.
3. Sosilaisasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* adalah proses pengenalan secara berangsur-angsur kepada masyarakat, agar masyarakat Jawa Barat akan selalu berpartisipasi dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara.
4. *Website* adalah sebuah sistem dimana informasi dalam bentuk *hypertext* yng dapat di akses dengan menggunakan alamat *website* tertentu. *Website* *www.kpu.jabarprov.go.id* mempunyai banyak manfaat diantaranya adalah

untuk promosi, sosialisasi, dan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mengakses.

5. Asas Motivasi Kepala Sub Bagian Humas KPU dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur yaitu sesuatu yang mendasar yang sifatnya permanen, umum dalam menggerakan mengarahkan sumber daya manusia agar secara produktif berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan, yang terdiri dari indikator sebagai berikut:
   1) Asas Mengikutsertakan adalah mengajak bawahan untuk ikut berpartisipasi dan memberikan kesempatan kepada mereka mengajukan pendapat, rekomendasi dalam pengambilan keputusan. Kepala Sub Bagian Humas memberikan kesempatan kepada pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id* yang meliputi:
      a. Partisipasi dari para pegawai dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara.
      b. Adanya pengawasan yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas KPUBudaya organisasi yang dimiliki oleh Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat.
      c. Kerjasama yang baik antar instansi yang terkait dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.

2) Asas Komunikasi adalah menginformasikan secara jelas mengenai tujuan yang ingin dicapai, cara-cara mengerjakannya dan kendala yang dihadapi dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*, yang meliputi:
   a. Proses penyampaian informasi mengenai hasil penghitungan suara pada pemilihan gubernur Jawa Barat.
   b. Kejelasan penyampaian informasi dengan jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh organisasi lain dan tentunya masyarakat.
   c. Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyampaian informasi hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.
3) Asas pengakuan adalah memberikan penghargaan, pujian dan pengakuan atas prestasi kerja, khususnya Kepala Sub Bagian Humas KPU memberikan penghargaan atas prestasi kerja pegawai dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*, yang meliputi:
   a. Sumber Daya sebagai keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilu Gubernur Jawa Barat.
   b. Struktur birokrasi dan budaya birokrasi sebagai penentu keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.

c. Norma-norma yang mengatur dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.

4) Asas wewenang adalah memberikan kewenangan dan kepercayaan diri, bahwa dengan kemampuan dan kreatifitasnya kepada pegawai bahwa kemampuan dan kreatifitasnya mampu mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*, yang meliputi:

   a. Kewenangan dan Kepemimpinan kepala Sub Bagian Humas dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.
   b. Produktifitas Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.
   c. Kemampuan aparatur dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.
   d. Profesionalisme Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.

5) Asas adil dan layak adalah memberikan keadilan kepada semua aparatur, kususnya dalam melaksanakan keberhasilan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*, yang meliputi:

a. Pengintegrasian sumber daya aparatur melalui seorang pemimpin di Sub Bagian Humas KPU Propinsi Jawa Barat.
b. Peningkatan kompetensi aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat.
c. Pelaksanaan tugas aparatur Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat

6) Asas perhatian timbal balik adalah saling ketergantungan antara kedua belah pihak antara bawahan dan pimpinan, khususnya Kepala Sub Bagian Humas memberikan perhatian kepada bawahan agar termotivasi untuk mengerjakan pekerjaan dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 melalui *website* *www.kpu.jabarprov.go.id*, yang meliputi:
   a. Hubungan timbal balik antara Kepala Sub Bagian Humas KPU Provinsi Jawa Barat dengan aparatur agar mensosialisasikan hasil penghitungan suara dapat berjalan efektif.
   b. Kesediaan para pelaksana kebijakan untuk saling bekerjasama dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada pemilihan Gubernur Jawa Barat.

Secara singkat, kerangka pemikiran di atas dapat dilihat secara jelas dalam model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Bagan 1.1
Model Kerangka Pemikiran



Model kerangka berfikir diatas menjelaskan bahwa asas motivasi Kepala Sub Bagian Humas KPU dipengaruhi oleh enam (6) asas indikator yaitu Asas Mengikutsertakan Asas Komunikasi, Asas Pengakuan, Asas Wewenang , Asas adil dan Layak, Asas Perhatian Timbal Balik, enam asas ini berkemungkinan dalam keberhasailan mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 Melalui *Website* www.kpu.jabarprov.go.id.

1.6 Motode Penelitian

1.6.1 Metode Penelitian

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriftif dapat diartikan sebagai berikut:

> Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriftip dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertife kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian.(Burhan Bungin, 2001:124)

Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang ditunjukan untuk memecahkan masalah pada waktu penelitian atau pada masa sekarang yang aktual, sehingga penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok tertentu.

Melihat penjelasan di atas, maka pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, karena pengumpulan data dilakukan dengan observasi dan wawancara. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif adalah :

> "Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi".(Sugiyono, 2005:1).

Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam atau suatu data yang mengandung makna. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, akan tetapi lebih menekankan pada makna.

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan fokus dan tujuan penelitian, yaitu:

1. Studi kepustakaan (*Library Reserch*) Penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Disamping itu dengan menggunakan studi pustaka, peneliti dapat memperoleh informasi tentang teknik-teknik penelitian yang diharapkan, sehingga pekerjaan peneliti tidak merupakan duplikasi.
2. Studi lapangan (*Fild Research*) Peninjuan yang dilakukan langsung pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang meliputi objek penelitian dengan tujuan yakni, mencari bahan-bahan sebenarny, bahan-bahan yang lebih banyak, lebih tepat, lebih *up to date*, disamping itu peneliti juga melakukan suatu penelitian dengan cara sebagai berikut:

   a) Observasi (*Observation*)

      Pengumpulan data dengan mengamati secara langsung keadaan instansi atau lembaga dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Observasi dilakukan peneliti terhadap Asas Motivasi Kepala Sub Bagian Humas KPU Dalam Mensosialisasikan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 Melalui *Website* *www.kpu.jabarprov.go.id*. Dengan menggunakan cara penelitian di atas, peneliti ingin mengetahui kebenaran pandangan teoritis tentang masalah yang diselidiki dalam hubungannya dengan

dunia kenyataan. Disamping itu juga untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah dan munkin petunjuk-petunjuk cara memecahkanya.

b) Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan pimpinan instansi dan bagian-bagian yang menangani masalah yang diteliti. Peneliti melakukan wawancara dengan nara sumbernya, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam Asas Motivasi Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat KPU dalam Mensosialisasikan Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 Melalui *Website* *www.kpu.jabarprov.go.id*.

1.6.3 Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini adalah *purposive* (pengambilan informan berdasarkan tujuan). Teknik penentuan informan ini adalah siapa yang akan dijadikan sebagai anggota informan diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

Menurut Sanafiah Faisal teknik pengambilan sampel *purposive* adalah teknik pengambilan sampel yang didasarkan atas kriteria atau pertimbangan tertentu, jadi tidak melalui proses pemilihan sebagaimana yang dilakukan dalam teknik random. Sampel ditetapkan secara sengaja oleh peneliti (Faisal, 1996:67).

Penentuan informan dalam penelitian ini berdasarkan objek yang diteliti dan berdasarkan keterkaitan informan tersebut dengan penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Jawa Barat, yaitu Heri Sueherman, SH.
2. Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, yaitu Drs. Dadang Sutrisno.
3. Agus Ridwan Sm, Hk. Staf Aparatur Hukum dan Humas.

Penentuan informan untuk nara sumber yang kedua adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Partai Politik yang dianggap mengetahui proses dalam mensosialisasikan hasil penghitungan suara pada Pemilihan Gubernur Jawa Barat. Adapun informan sebagai berikut:

1. BPD Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong.
2. BPD Desa Sariwangi Kecamatan Parompong.
3. Masyarakat Umum khususnya masyarakat Desa Cihanjuang Kec. Parompong.
4. DPD KNPI Jawa Barat Jl. Sukarno Hatta No 623 Bandung.
5. LBH & HAM Citra Siliwangi Jl. L.L R.E Martadinata no 57 Bandung.
6. Partai Politik Golongan Karya, Partai Politik Demokrat yang mencalonkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu H.Dany Setiawan dan H. IwanR.Sulandjana (DAI).
7. Partai Politik PDIP, PPP, PKB, PBB, PKPB, PDS, PBR yang mencalonkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu H. AgumGumelar dan H. Nu`manAbdulhakim (AMAN).

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mencalonkan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu H. Ahmad Heryawan dan H. Dede Yusuf (HADE).

1.6.4 Analisis Data

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penulisan ini terdapat tiga teknik, yang dikutip dari Sugiyono dalam bukunya yang berjudul *Memahami Penelitian Kualitatif*, ketiga teknik tersebut sebagai berikut:

Pertama, reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

Kedua, penyajian data setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Penyajian data yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

Ketiga, penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

Penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal tetapi mungkin juga tidak dapat menjawab rumusan masalah, karena seperti yang dikemukakan diatas bahwa masalah dan rumusan masalah dalam metode penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti dilapangan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi dan Penelitian ini adalah Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat. Jl. Garut No. 11 Telepon (022) 7278812 dan Fax (022) 7215894 Bandung.. Sedangkan jadwal penelitian ini berlangsung 10 (Sepuluh) bulan dengan perincian sebagai berikut:

1. Observasi awal di Kantor Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat pada Bulan Desember 2008.
2. Pengajuan Judul Usulan Penelitian kepada Dosen Pembimbing, pada bulan Januari – Februari 2009.
3. Penyusunan Usulan Penelitian, pada bulan Februari - Maret 2009.
4. Seminar Usulan Penelitian, pada bulan April 2009.
5. Pengajuan Surat ijin penelitian di Kantor Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat yang menjadi objek penelitian, pada bulan Mei 2009.
6. Pelaksanaan Penelitian di di Kantor Sekretariat KPU Provinsi Jawa Barat selama satu sampai sembilan bulan, pada bulan Mei 2009 – Februari 2010.

7. Penulisan Skripsi pada bulan Mei 2009 - Maret 2010.

8. Sidang Skripsi pada bulan April 2010.

Tabel 1.1
Jadwal Penelitian

No	Waktu / Kegiatan	Tahun 2008	Tahun 2009												Tahun 2010			
		Des	Jan	Feb	Mart	Apr	Mei	Jun	Jul	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mart	Apr
1	Observasi Awal																	
2	Pengajuan Judul UP																	
3	Penyusunan UP																	
4	Seminar UP																	
5	Pengajuan Surat Ijin																	
6	Pelaksanaan Penelitian																	
7	Penulisasan Skripsi																	
8	Sidang Skripsi																	